

# Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cilacap

Amni Zarkasyi Rahman

Universitas Diponegoro, Indonesia

Email: amni.rahman@live.undip.ac.id

Feri Lintang Saputra

Universitas Diponegoro, Indonesia

Email: ferilintangsaputra@students.undip.ac.id

## Abstrak

Salah satu indikator yang dapat digunakan dalam mengelola anggaran daerah dan keberhasilan pembangunan adalah menggunakan rasio efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam mengelola keuangan daerah terdiri dari kewenangan pengelolaan keuangan daerah, prinsip umum dan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk mengetahui suatu daerah mengelola keuangan dengan baik maka dapat dilihat menggunakan rasio efisiensi dan efektivitas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan di daerah Kabupaten Cilacap. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 2016-2020 Kabupaten Cilacap, data ini kemudian dianalisis menggunakan rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Hasil pada penelitian ini adalah rata-rata tingkat efisiensi selama periode tahun 2016 sampai 2020 tergolong baik dengan rata-rata 3,37%. Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cilacap juga menunjukkan sangat efektif dengan rata-rata selama periode 2016 sampai 2020 adalah 106,35 %. Diperlukan optimalisasi pemanfaatan pengelolaan keuangan secara digital agar dimasa mendatang dapat diketahui kondisi keuangan secara *real time*.

*One of the indicators that can be used in managing regional budgets and the success of development is to use the ratio of efficiency and effectiveness of regional financial management. In managing regional finances, it consists of the authority to manage regional finances, general principles and the structure of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). To find out an area manages finances well, it can be seen using the ratio of efficiency and effectiveness. The purpose of this study was to determine and analyze the level of efficiency and effectiveness in financial management in the Cilacap Regency area. This study uses secondary data in the form of the Regional Revenue and Expenditure Budget for the 2016-2020 period of Cilacap Regency, this data is then analyzed using efficiency ratios and effectiveness ratios. The results in this study are the average level of efficiency during the period 2016 to 2020 is classified as good with an average of 3.37%. The level of effectiveness of Cilacap Regency's regional financial management also shows that it is very effective with the average during the 2016 to 2020 period being 106.35%. It is necessary to optimize the use of digital financial management so that in the future financial conditions can be known in real time.*

**Kata Kunci:** Efektivitas, Efisiensi, Keuangan Daerah

## PENDAHULUAN

Keberhasilan dalam membangun sebuah daerah tidak dapat terlepas dari sebuah aspek pengelolaan anggaran daerah tersebut. Ketika anggaran suatu daerah di kelola dan diimplementasikan dengan benar dalam pembangunan daerah maka akan menjadikan daerah tersebut semakin berkembang. Perlu kita ketahui bahwa tema APBN 2015 adalah "Melanjutkan reformasi pembangunan untuk percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan" tema ini sejalan dengan peningkatan pemberdayaan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan

di pedesaan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan tema tersebut, dapat kita artikan bahwa pemerintah sangat mengutamakan APBN di daerah, keberhasilan dari pembangunan tersebut tergantung dari cara pengolahan anggaran tersebut dalam pembangunan. Apakah anggaran itu diimplementasikan secara efektif dan efisien atau justru di salahgunakan oleh oknum yang mengurus.

Efektivitas dan efisiensi adalah bagian dari bentuk untuk mewujudkan *good governance*. Isu mengenai *good governance* sudah mulai muncul sejak awal era dari otonomi daerah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak daerah yang menganggap dan mengabaikan mengenai konsep *good governance* ini dalam mengelola anggaran daerah. Efisiensi dapat dikatakan sebagai upaya pemaksimalan yang dihasilkan melalui struktur atau cara yang benar supaya kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dan mencapai target yang direncanakan. Kita dapat melihat efisiensi keuangan melalui hasil perhitungan rasio efisiensi. Rasio efisiensi merupakan suatu rumus yang digunakan untuk menilai selisih antara total realisasi belanja yang digunakan oleh daerah dengan total realisasi pendapatan yang diterima oleh daerah agar selisih dari realisasi belanja daerah dan pendapatan daerah tersebut dapat tergambar dengan jelas (Sudaryono et al., 2017). Secara singkat efektivitas berkaitan dengan output dan tujuan, maka semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan (Koromath, 2020). Sedangkan efisiensi dapat tercapai apabila jumlah dari hasil output dapat memenuhi target dan sasaran ditetapkan (Muflihani, 2018). Berdasarkan dua pendapat ahli ini maka dapat disimpulkan bahwa Optimasi anggaran sangat perlu untuk dilakukan dengan efisien dan efektif, hal ini tentunya merupakan wujud nyata pertanggungjawaban dari pemerintah daerah. Seperti yang disampaikan oleh Andri Meiriki dalam Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah (2020) bahwa output yang maksimal adalah hasil dari penggunaan anggaran masyarakat yang efisien dan efektif akan mencapai target untuk kepentingan masyarakat

Rasio efisiensi dan efektivitas dapat digunakan untuk menganalisis kinerja dalam keuangan daerah. Perlunya analisis keuangan daerah karena untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan dan peluang terhadap aktivitas keuangan daerah secara detail. Kita dapat melakukan analisis tentang anggaran daerah menggunakan dua metode. Pertama, menggunakan metode analisis terhadap penerimaan daerah. Kedua, menggunakan analisis terhadap belanja daerah. Keuangan daerah dapat dikatakan efisien apabila memiliki presentasi rasio efisiensi dibawah 60%, sedangkan untuk melihat efektivitas keuangan daerah dapat dilihat apabila rasio efektivitas berada di atas 100% dan apabila di bawah 60% maka dikatakan tidak efektif.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kegiatan yang didalamnya terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan mengenai keuangan daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 pasal 3 yang meliputi kewenangan pengelolaan keuangan daerah, prinsip umum dan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengawasan pengelolaan keuangan daerah dan lain sebagainya. Dalam mengelola keuangan daerah harus dilakukan dan dikelola secara benar, efektif, efisien, transparan dan mentaati peraturan perundang-undangan.

Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari melakukan perencanaan atau penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD untuk kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyusunan APBD disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan dana yang diperoleh dari pendapatan asli daerah. Dalam Menyusun APBD, kita harus berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tujuan untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 181 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 17-18, yang menjelaskan bahwa "proses penyusunan APBD harus didasarkan pada penetapan prioritas dan pagu anggaran, rencana kerja Pemerintah Daerah. dan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, setiap komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan perlu dilihat dari kapasitas daerah,

yaitu berapa realisasi dan kontribusinya setiap tahunnya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran perkembangan kemampuan keuangan daerah selama ini. Untuk melakukan evaluasi tersebut dapat dihitung tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran setiap program pembangunan yang telah ditetapkan untuk suatu periode tahun anggaran yang bersangkutan. Proses evaluasi ini dapat dilakukan dengan membandingkan besaran anggaran yang telah ditetapkan untuk setiap program kegiatan di setiap kecamatan dengan realisasi penggunaan yang telah dicapai pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Perlu kita ketahui bahwa kepala daerah merupakan orang yang diberikan mandate secara langsung oleh presiden untuk memegang keuangan daerah yang diberikan. Sedangkan yang melaksanakan pengendali anggaran daerah merupakan PPKD beserta bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Dalam mengelola anggaran daerah, pemerintah kabupaten yang bertugas harus memperhatikan sepuluh asas dalam mengelola keuangan menurut undang-undang. Asas ini diantaranya adalah asas bertanggung jawab, asas taat pada aturan, asas efektif dan efisien, transparan, ekonomis, dan lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Cilacap. Alasan peneliti memilih untuk menganalisis tingkat rasio efisiensi dan efektivitas anggaran daerah di Kabupaten Cilacap karena ingin mengetahui seberapa besar tingkat APBD yang telah dilaksanakan di Kabupaten Cilacap sampai saat ini dan melihat perbedaan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten yang besar di wilayah Jawa Tengah.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan (Moleong, 2007). Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan keadaan yang terjadi di lapangan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama penelitian lapangan. Pendekatan yang dilakukan adalah studi kasus di kabupaten Cilacap yang menjadi lokasi objek penelitian. penelitian ini dilakukan pada objek, dokumen dan lokasi penelitian yang diamati dengan mengumpulkan data sekunder. Data yang terdapat dalam penelitian ini menggunakan data yang diambil dari Anggaran Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap, data tersebut kemudian dibagi menjadi dua sesuai dengan yang akan diolah dalam rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Data Anggaran Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap yang telah dihitung dan diolah menggunakan rasio efisiensi dan efektivitas kemudian disimpulkan untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam memahami. Melalui hal tersebut pembaca akan lebih mudah dalam memahami rasio tingkat efisiensi dan rasio tingkat efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap selama periode Tahun 2016 sampai Tahun 2020.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah**

Sistem pengelolaan keuangan daerah merupakan unsur terpenting dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di pemerintah daerah, hal ini karena sistem digunakan untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan serta untuk mengakomodasi beragam macam tuntutan dan aspirasi yang ada di masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah menyatakan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang akan dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada peraturan ini juga sudah mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah yang harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab berdasarkan azas keadilan dan kepatutan. Selain itu sistem pengelolaan keuangan daerah juga diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah yang menjelaskan bahwa keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban daerah dalam

menyelenggarakan pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah meliputi rencana, pelaksana, hingga pemngawasan keuangan.

Anggaran daerah dalam pendapatan belanja daerah didefinisikan sebagai alokasi sumber daya daerah dan media yang digunakan untuk mengevaluasi prestasi atau pendapaian dari pemerintah daerah dalam membayar pembangunan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat sehingga mendorong kesejahteraan masyarakat bersama (Tuasikal, 2008)

Dalam pengelolaan anggaran daerah, pemerintah daerah harus mengelola menggunakan azas tertentu dimana keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisiensi, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperlihatkan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat (Siregar, 2015).

Selain itu Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah (Rochmansyah, 2010) juga memberikan pemahamannya terkait prinsip-prinsip yang digunakan dalam mengelola keuangan daerah untuk dapat mengontrol kebijakan keuangan daerah, prinsip-prinsip ini diantaranya seperti

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam prinsip pengelolaan keuangan daerah berarti mengambil keputusan dengan perilaku yang amanah. Maka dari itu untuk mencapai keberhasilan atas program atau kebijakan yang dirumuskan dapat dilakukan dengan berkomunikasi secara vertikal dan horizontal kepada masyarakat.

2. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (*Probility*)

Maksud dari prinsip ini adalah pemerintah daerah memberikan tugas dalam mengelola keuangan daerah kepada pegawai yang dipercaya memiliki integritas dan kejujuran tinggi.

3. Transparansi

Prinsip Transparansi memiliki arti bahwa pemerintah daerah dalam mengelola harus bersikap apa adanya sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat setempat.

4. Pengendalian

Dalam mengelola keuangan daerah tidak boleh telat dalam mengevaluasi. Harus selalu melakukan perbandingan antara dana yang di anggarkan dengan yang diperoleh dengan tujuan keuangan daerah dapat terkendali dan lebih dari yang telah ditetapkan.

5. Value For Money

Konsep *Value for Money* dalam pengelolaan keuangan daerah mencakup dua hal yaitu ketidakhematan dan ketidakefektivan.

Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah (Mardiasmo & Kirana, 1999). Anggaran pendapatan asli daerah atau APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Dalam mengelola keuangan daerah khususnya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peran dari pemerintah daerah sangat menentukan. Apabila Pendapatan Asli Daerah tersebut tidak dapat di optimalkan dengan baik dan tidak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah setempat, maka akan berakibat fatal terhadap pengelolaan keuangan daerah tersebut. Menurut M. Awani (Awani, 2021) Permasalahan yang sering terjadi pada PAD di pemerintah daerah di Indonesia adalah Pendapatan Asli Daerah yang rendah disbanding dengan tingginya ketergantungan dengan dana Trasfer pemerintah Pusat. Sebagai contoh pada pengelola keuangan pemerintah Kabupaten Gianyar yang diteliti oleh Wandari (2021) berdasarkan rasio keuangan APBD periode 2016-2020 dimana terjadi kondisi rasio keuangan daerah yang kurang baik. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah gianyar kurang memanfaatkan kemandirian dan kurang mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang dimiliki sehingga mengakibatkan ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat. Disisi lain efektivitas belanja daerah kabupaten Gianyar juga lebih besar disbanding pendapatan daerahnya. Hal inilah yang menjadikan pemngelolaan keuangan daerah di Gianyar dalam kondisi kurang baik selama periode 2016-2020.

## Efisiensi Keuangan Daerah

Efisiensi pengelolaan anggaran daerah adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan/proyek dengan melakukan perbandingan antara output dan input. Rumusan efisiensi yang akan dibahas adalah rasio dari realisasi pengeluaran (belanja) daerah dengan total pendapatan daerah (Widodo, 1990). Sartika (2019) mengatakan bahwa rasio efisiensi daerah merupakan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Sartika ini maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah dikatakan efisien apabila rasio kurang dari 100%, dengan kata lain semakin kecil persenan maka akan semakin efisien. Rasio Efisiensi dapat dikatakan juga sebagai perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Budianto, 2020). Dalam Analisis Pengelola Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Di Kota Manado yang ditulis oleh Daniel Franky Sambow (Sambow, 2016) dijelaskan bahwa untuk menganalisis kinerja anggaran pemerintah daerah kita dapat menggunakan penghitungan rasio keuangan terhadap APBD yang sebelumnya telah ditetapkan dan dijalankan seperti yang disampaikan (Halim, 2002). Disamping itu rasio keuangan yang dapat digunakan dalam mengukur akuntabilitas anggaran daerah diantaranya rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi (Halim, 2002). Sebagai contoh adalah rasio efisiensi pada pengelolaan keuangan daerah Kutai Kartanegara telah menunjukkan kondisi yang memprihatinkan yaitu pada posisi kurang efisien, dimana pada tahun 2014 rasio efisiensi mencapai 99,74% dan pada tahun 2015 mencapai 133,39% (Martati, 2017). Semakin besar persen dalam rasio efisiensi maka akan semakin buruk juga pengelolaan keuangan daerah di daerah tersebut. Penyebab dari buruknya rasio efisiensi Kutai Kartanegara karena kemampuan fiskal Kutai Kartanegara melemah dan keuangan daerah dalam kondisi defisit anggaran

Formula untuk menghitung rasio efisiensi keuangan daerah adalah sebagai berikut

$$\text{EFISIENSI} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja (Pengeluaran)}}{\text{Total Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

### Rincian Perolehan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap Dalam Tahun Anggaran 2016 – 2020 Dari LRA Kabupaten Cilacap Tahun 2022

Tahun	Intensif Pemungutan Pajak	Intensif Pemungutan Retribusi	Total Biaya Perolehan Anggaran
2016	5.933.553.251	619.395.826	6.552.949.077
2017	6.256.949.041	720.307.054	6.977.256.095
2018	7.179.606.659	754.871.403	7.934.478.062
2019	8.878.659.045	780.122.242	9.658.781.287
2020	4.103.058.249	369.603.944	4.472.662.193

Sumber : Olah data Peneliti, 2022

### Rincian Total Pendapatan Asli Daerah Yang Berasal Dari Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016-2020

Tahun	Pendapatan Pajak	Pendapatan Retribusi	Total Pendapatan
2016	137.808.910.786	31.090.888.236	168.899.799.022
2017	156.393.830.406	32.433.916.350	188.827.746.756
2018	185.943.092.741	43.486.837.366	229.429.930.107
2019	209.475.848.896	44.740.277.398	254.216.126.294
2020	203.118.563.271	18.969.873.119	222.088.436.390

Sumber : Olah data Peneliti, 2022

Dua Tabel diatas akan digunakan penulis untuk menghitung rasio efisiensi dari pendapatan asli daerah kabupaten cilacap yang dihitung dari pajak dan retribusi tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, perhitungan rasio efisiensi adalah sebagai berikut :

**Penghitungan Rasio Efisiensi Tahun 2016 sampai 2020 Kabupaten Cilacap**

Total Biaya Perolehan	Total Pendapatan	Efisiensi	Keterangan
6.552.949.077	168.899.799.022	3,88	Sangat Efisien
6.977.256.095	188.827.746.756	3,70	Sangat Efisien
7.934.478.062	229.429.930.107	3,46	Sangat Efisien
9.658.781.287	254.216.126.294	3,80	Sangat Efisien
4.472.662.193	222.088.436.390	2,01	Sangat Efisien
Rata - Rata		3,37	Sangat Efisien

Sumber : Olah data Peneliti, 2022

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap diatas, dapat dikatakan bahwa rasio efisiensi keuangan daerah yang dilihat dari pajak dan retribusi daerah Kabupaten Cilacap dinilai sangat efisien. Berdasarkan tabel diatas dapat dipahami bahwa tingkat efisiensi tertinggi pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terjadi pada tahun 2020 yang mencapai tingkat efisiensi sebesar 2,01%. Walaupun pada tahun 2020 total biaya yang diperoleh dan realisasinya terhitung kecil, akan tetapi perlu kita ketahui bahwa semakin kecil nilai presentasi rasio efisiensi, maka akan semakin tinggi juga tingkat efisiensi pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya guna pencapai target. Disisi lain, periode tahun 2016 merupakan tahun dimana prosentase rasio efisiensi terbesar dalam lima tahun ini yaitu sebesar 3,88% yang berarti tahun 2016 merupakan tahun dengan efisiensi terbesar dibanding tahun 2017-2020.

### **Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah**

Dalam Menyusun APBD salah satu prinsip yang digunakan adalah efisien dan efektif. Kita dapat menghitung rasio efektivitas keuangan daerah kabupaten cilacap menggunakan formula rasio efektivitas. Hal ini bertujuan apakah daerah yang memiliki tingkat efisiensi tinggi tentu memiliki tingkat efektivitas yang bagus juga, atau justru dapat berkebalikan. Mardiasmo (dalam Pangkey & Pinatik, 2015) mengatakan bahwa efektivitas pada dasarnya berkaitan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah merupakan cara menghitung yang memiliki tujuan agar dapat menggambarkan kinerja keuangan pemerintah suatu daerah dalam mencapai target PAD yang sebelumnya telah ditentukan. Dalam rasio efektivitas pendapatan asli daerah, apabila semakin tinggi presentase rasio efektivitas menandakan semakin baik, efektif, dan juga memiliki kemampuan yang tinggi dalam menyelenggarakan pemerintah dengan pencaian realisasi tinggi.

Rasio ini juga dapat dikatakan sebagai rasio yang menjelaskan lebih detail terkait kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan program atau kebijakan yang menggunakan dana pendapatan asli daerah apakah sudah sesuai atau justru menyimpang. Rasio ini juga sebagai titik utama yang akan menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dana pada belanja rutin dan belanja optimal daerah (Nurul Amin, 2015). Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas antara lain partisipasi dalam penyusunan anggaran, tingkat kesulitan anggaran, keterlibatan manajemen puncak, peran departemen anggaran, laporan yang akurat dan tepat waktu (Agus Sunaryo, 2006). Sebagai contoh pada pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode 2014-2015 dimana terjadi penurunan pada rasio efektivitas yang awalnya sangat efektif menjadi kurang efektif yaitu dari 113,60% menjadi 77%. Tentu ini sangat dipertanyakan karena sebelumnya telah mencapai efektivitas yang sangat baik. Setelah di usut ternyata pada periode 2014-2015 kemampuan daerah dalam merealisasikan target pendapatan yaitu khususnya pendapatan asli daerah sangat menurun disbanding dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill. Maka dari itu pemerintah daerah harus benar benar merealisasikan program menggunakan PAD dengan sesuai dan tidak menyimpang.

Rumus dalam, menghitung rasio efektivitas PAD adalah sebagai berikut :

$$\text{EFEKTIVITAS} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$$

Berikut adalah data Realisasi PAD dan Target PAD Kabupaten Cilacap dalam periode Tahun 2016 sampai Tahun 2020

#### Realisasi PAD dan Target PAD Kabupaten Cilacap dalam periode Tahun 2016 sampai Tahun 2020

Tahun	Realisasi PAD Kabupaten Cilacap	Target PAD Kabupaten Cilacap
2016	428.598.349.897,42	387.045.051.000
2017	648.091.381.095,69	612.077.977.866
2018	527.577.740.281,47	497.353.613.147
2019	574.276.795.303,59	553.906.636.361
2020	591.343.787.160,48	561.113.709.065

Sumber : Olah data Peneliti, 2022

Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2016 sampai 2020 dapat dilihat dari tabel berikut :

#### Penghitungan Rasio Efektivitas Tahun 2016 sampai 2020 Kabupaten Cilacap

Realisasi PAD	Target PAD	Efektivitas	Keterangan
428.598.349.897,42	387.045.051.000	110,74%	Sangat Efektif
648.091.381.095,69	612.077.977.866	105,88%	Sangat Efektif
527.577.740.281,47	497.353.613.147	106,08%	Sangat Efektif
574.276.795.303,59	553.906.636.361	103,68%	Sangat Efektif
591.343.787.160,48	561.113.709.065	105,39%	Sangat Efektif
Rata - Rata		106,35%	Sangat Efektif

Sumber : Olah data Peneliti, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Cilacap dalam jangka waktu 5 tahun yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dengan rata-rata 106,35. Maka dapat dikatakan bahwa realisasi pendapatan asli daerah terhadap target pendapatan asli daerah sangat efektif. Kita juga dapat melihat dari tabel yang ada bahwa tingkat efektivitas untuk realisasi PAD terhadap Target PAD tahun 2016 sangatlah baik dibanding 4 tahun di depannya walaupun jumlah target dan realisasi tidak sebanyak tahun 2017 sampai tahun 2020. Berdasarkan hal ini maka perlu kita ketahui bahwa suatu upaya dan usaha dari pemerintah dalam pencapaian realisasi sangatlah mempengaruhi tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah perlu mengutamakan upaya dan usaha yang besar dalam menekan pengeluaran agar biaya pemerolehannya dapat mengukur efektivitas pendapatan asli daerah.

#### Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Cilacap Saat Ini.

Menurut (Mahsun, 2012), kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Menurut (Mardiasmo, 2002) Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan

yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya.

Dalam menganalisis dan menghitung kinerja keuangan pemerintah daerah cilacap menggunakan rasio efisiensi dan efektivitas diatas dalam jangka waktu lima tahun dari tahun 2016 sampai tahun 2020 dapat dikatakan sangat efisien dan juga sangat efektif. Akan tetapi pada dasarnya setiap daerah memiliki permasalahan atau hambatan tersendiri dalam kinerja keuangan pemerintahannya, tidak semua daerah memiliki hambatan dan permasalahan dalam mengatur keuangan daerahnya. Pemerintah daerah wajib untuk memperhatikan keuangan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak, Retribusi, dan Pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan agar asset sumber daya yang menjadi pendapatan pemerintah daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Permasalahan atau hambatan yang terjadi di dalam kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah diantaranya yaitu adanya perubahan peraturan yang mengharuskan adanya *Refocusing*. Maka dari itu pemerintah daerah Kabupaten Cilacap harus melakukan pendataan ulang objek pajak di berbagai kecamatan di cilacap, selain itu pemerintah daerah juga harus terus mengencangkan infografis dan sosialisasi kepada masyarakat untuk wajib membayar pajak dan tidak telat dalam membayar.

## SIMPULAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang dicapai dengan menjalankan kekuasaan pemerintahan. Urgensi penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan dilatarbelakangi oleh perubahan dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat. Penyempurnaan regulasi mengelola anggaran suatu daerah diperlukan supaya mengetahui tingkat rasio efisien dan efektif nya. Berdasarkan penghitungan rasio efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan di daerah Kabupaten Cilacap selama periode Tahun 2016- 2020, maka dapat disimpulkan bahwa Rata-rata Tingkat Efisiensi dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Cilacap dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dikatakan sangat efisien yaitu menyentuh angka 3,37%. Selain memiliki pengelolaan keuangan yang sangat efisien dalam lima tahun, Kabupaten Cilacap juga memiliki rata-rata tingkat efektivitas yang sangat efektif dari tahun 2016 sampai Tahun 2020 yang menyentuh angka 106,35 %.

Dengan hasil penghitungan rasio efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran daerah di Kabupaten Cilacap dari tahun 2016-2020 tersebut juga menjadikan pemerintah kabupaten Cilacap harus dapat mempertahankan prestasinya atau bahkan ditingkatkan lagi agar pengelolaan keuangan Kabupaten Cilacap selalu efektif dan efisien. Disisi lain tingkat rasio efektif dan efisiensi di Kabupaten Cilacap masih dapat terkendali sampai saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Awani, M. F, & Hariani, S. (2021). Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 95–102. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i2.158>
- Budianto, A. (2020). *Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016-2020*. 32.
- Koromath, J. P. (2020). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Manokwari. *Lensa Ekonomi*, 11(1), 13–23.
- Martati, I. (2017). Effectiveness and Efficiency Analysis of Regional Financial Management of Kutai Kartanegara. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 6(8), 2021–2024. <https://doi.org/10.21275/ART20176398>
- Mardiasmo & Kirana, W. J. (1999). *Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik*, (Managing public-oriented regional finance). Yogyakarta: *Kompak STIE YO Indonesia*.



- Meiriki, A., Musharianto, A., & NS, N. L. (2020). Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Musamus Journal of Public Administration*, 3(1), 10–19. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v3i1.3140>
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*.
- Muflihani, F. (2018). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Kota Palu (Studi Kasus Pada Kota Palu)*. University of Muhammadiyah Malang.
- Nurul, A. (2015). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kabupaten Bengkalis. *Iqtishaduna*, 80–91. <https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/64>
- Sambow, D. F. dkk. (2016). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), 247–259.
- Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Inovasi Bisnis*, 7, 147–153. <https://doi.org/10.47221/tangible.v5i1.103>
- Sholeh, C dan Rochmansjah. H, 2010, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Fokusmedia
- Sudaryono, Y., Sjarif, D., & Sofiati, N. A. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sunaryo. A. 2006. *Pengaruh Variabel-Variabel Karakteristik Anggaran Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Pada PT. Persero Pelabuhan Indonesia III*
- Tuasikal, A. (2008). Pengaruh Dau, Dak, Pad, Dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 1(2), 124–142.
- Wandari, K A B Wicaksana, and Adi Suprpto, (2021). *Analysis Financial Ratio of Regional Government Budget in Assessing Financial Management Performance of Regional Government of Gianyar Regency*.<http://ojs2.pnb.ac.id/index.php/JASAFINT>
- Widodo. (1990). *Ekonomi Indonesia dala Era Liberisasi*. Kanisius.

